



**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR Tahun
2012-2017**

SKRIPSI

Oleh :

Anugrah Leksono Narendra Ananta

Nim. 120810101154

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR Tahun
2012 - 2017**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Anugrah Leksono Narendra Ananta

Nim. 120810101154

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda saya Prastito Rini Dra., M.Si dan ayahanda Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H., tersayang atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak terhingga kepada penulis
2. Saudaraku Kukuh Leksono Suminaring Aditya S.H. LL.M. dan istri mbak Ayu Caesara A. Y .S.H. yang telah mensupport penulis, dan adikku Salsabil Firdausi Leksono Putra.
3. Dosen-Dosen perguruan tinggi yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas agar penulis menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Baqarah : 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 5)

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik
terhadap diri sendiri.
(Benyamin Franklin)

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan
diperbuatnya.
(Ali Bin Abi Thalib)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anugrah Leksono Narendra Ananta

Nim : 120810101154

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember,
Yang menyatakan,

Anugrah Leksono Narendra Ananta
NIM.120810101154

SKRIPSI

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR Tahun
2012- 2017**

Oleh

Anugrah Leksono Narendra Ananta
NIM 120810101154

Pembimbing

Pembimbing Utama: Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

Pembimbing Anggota: Dr. Herman Cahyo D, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI
JAWA TIMUR Tahun 2012 - 2017
Nama Mahasiswa : Anugrah Leksono Narendra Ananta
NIM : 120810101154
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 21 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.
NIP. 197806162003122001

Dr. Herman Cahyo D, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi IESP

Dr. Herman Cahyo D, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR Tahun
2012-2017

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anugrah Leksono Narendra Ananta

NIM : 120810101154

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 Desember 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi P. M.Si (.....)

NIP 197002061994031002

2. Sekretaris : Fajar Wahyu P., S.E., M.E. (.....)

NIP 198103302005011003

3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani., M.Si (.....)

NIP 196101221987022002

Mengetahui / Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP 19710727 199512 1001

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR Tahun 2012
- 2017**

Anugrah Leksono Narendra Ananta

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari masalah sosial berupa terbatasnya penyerapan tenaga kerja bagi jumlah angkatan kerja yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan diolah dengan metode regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB dan UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan UMR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

Kata Kunci : penyerapan tenaga kerja, PDRB, UMR, UKM

The Analysis of Employment Absorption in East Java 2012- 2017

Anugrah Leksono Narendra Ananta

*Departement of Economics and Development Study, the Faculty of Economics,
the University of Jember*

ABSTRAK

The East Java Province is inseparable from social problems in the form of limited employment for the available workforce. The purpose of this study was to examine and analyze employment in East Java Province in 2012-2017. And the data used in this study are secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java and are processed using panel data regression method. The results of the analysis show that the GRDP and SMEs have a positive and significant effect on employment absorption, and the regional minimum wage has no positive and no significant effect on employment in East Java Province.

Keywords: *EMPLOYMENT, GRDP, regional minimum wage, SME's*

RINGKASAN

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dan lebih dari 500 kota/kabupaten serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan harus merata agar masyarakat di daerah kecil dapat ikut merasakan pembangunan. Pembangunan memiliki definisi yang sangat luas yaitu proses yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan dari proses pembangunan ini adalah meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi sebagai barang kehidupan pokok, meningkatkan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial (Arsyad, 2010:11)

Faktor penting tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia pada pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah tingginya jumlah pengangguran, dimana pengangguran adalah masalah yang menghambat proses pembangunan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang melimpah didukung oleh sumber daya alam (SDA) yang merupakan modal terbesar negara Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik, yaitu tersedianya lapangan kerja

Selain tenaga kerja, salah satu faktor yang mendukung pembangunan negara adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan banyaknya UKM tersebar di Indonesia, pengangguran yang ada di Indonesia dapat berkurang dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pemerintah harusnya membantu para pengusaha kecil dalam melakukan perijinan.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan PDRB dan UKM memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dimana hasil dari penelitian diperoleh apabila PDRB dan UKM mengalami kenaikan maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya.

Sedangkan pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila UMR mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Karena perusahaan mengharuskan membayar lebih kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Selain mengurangi penyerapan tenaga kerja, perusahaan akan memilih untuk memutus hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang sudah berkeja, tujuan perusahaan melakukan hal itu adalah untuk mengurangi menstabilkan biaya produksi.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan ridhonya serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan suri tauladan yang telah diberikan kepada umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga kerja di Jawa Timur tahun 2012-2017”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membearikan bimbingan, arahan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan skripsi ini, serta nasehat dan semangat yang dicurahkan untuk memotivasi penulis;
3. Bapak Dr. Herman Cahyo D, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membearikan bimbingan, arahan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan skripsi ini, serta nasehat dan semangat yang dicurahkan untuk memotivasi penulis;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Orang tuaku tercinta momi saya Prastito Rini Dra., M.Si dan dedi Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H. tersayang atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak terhingga kepada ananda di masa depan;
6. Teman-Teman seperjuangan yang selalu saling mengangkat dan saling bantu didetik detik terkahir;

7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun dapat membantu penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Aamiin

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

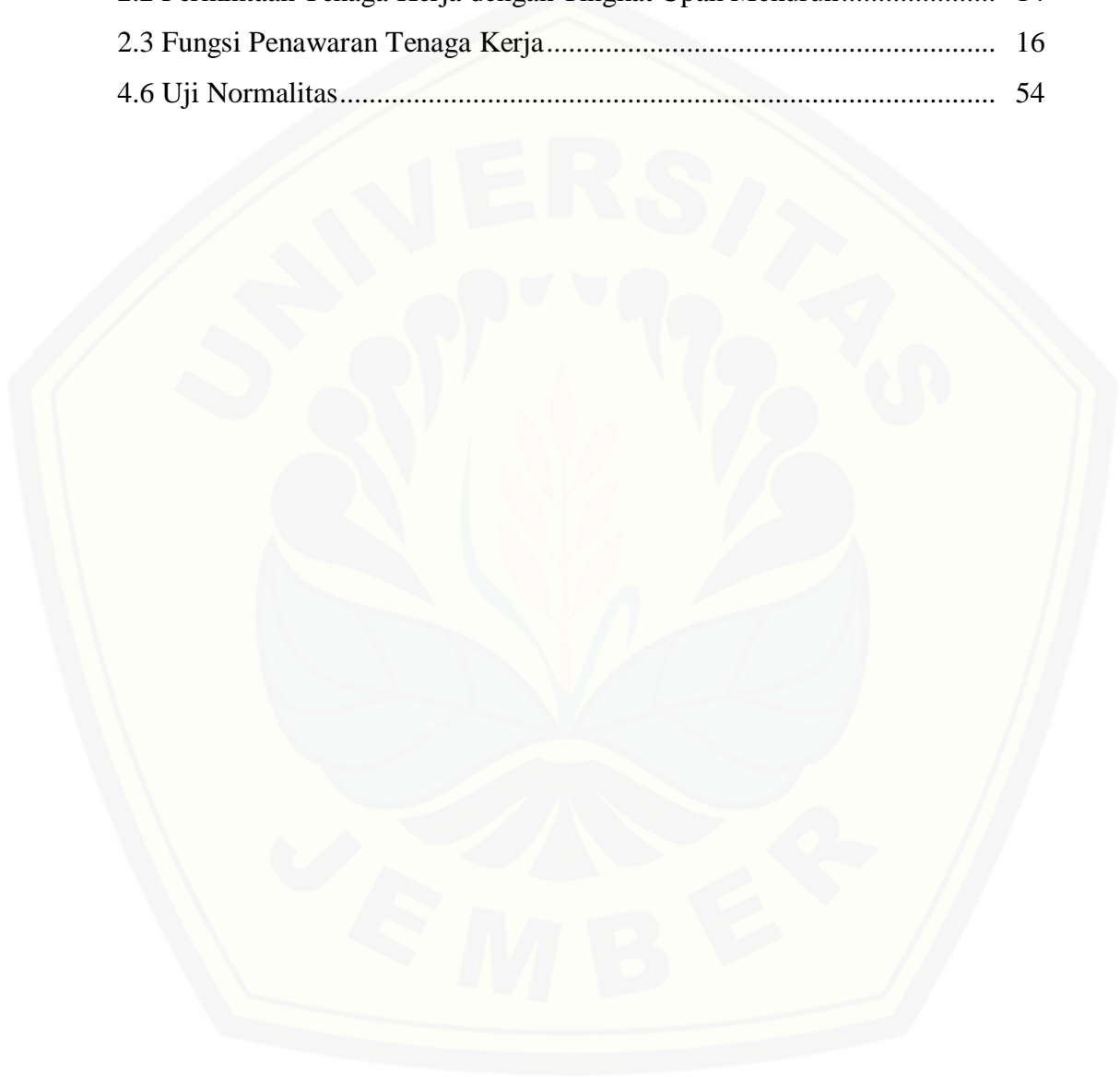
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	10
2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja.....	11
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja	15
2.1.4 Penawaran Tenaga Kerja	15
2.1.5 Pasar Tenaga Kerja	16
2.1.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	17
2.1.7 Klarifikasi Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM)	19
2.1.8 Teori Upah	19
2.1.9 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	21

2.1.10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
2.2	Pengaruh Antar Variabel.....	24
2.2.1	Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	24
2.2.2	Pengaruh UMR Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	25
2.3	Penelitian Terdahulu	28
2.3.1	Haryo Kuncoro Tahun 2013	28
2.3.2	Abdul Karib tahun 2012	29
2.3.3	Nenik Woyanti dan Ayu Wafi Lestari tahun 2011	29
2.3.4	Achmad Hendrawan Setiawan 2010.....	30
2.3.5	Ariyanto 2010	30
2.4	Kerangka Konsep	35
2.5	Hipotesis	37
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Lokasi Penelitian.....	38
3.3	Metode Pengumpulan Data	38
3.4	Metode Analisa.....	39
3.5	Metode Analisis Regresi Data Panel	39
3.5.1	Uji Hausmant Test	40
3.5.2	Uji Statistik	40
3.6	Uji Asumsi Klasik	43
3.7	Definisi Operational	45
BAB 4.	PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum.....	47
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	47
4.2	Analisis Data	49
4.2.1	Analisis data Statistik	49
4.2.2	Analisis Data Panel.....	50
4.3	Uji Statistik.....	51
4.3.1	Pengujian Koefisien Regresi secara Individu (Uji T).....	51
4.3.2	Pengujian Koefisien Regresi secara Serentak (Uji F).....	51

4.3.3	Koefisien Determinasi	52
4.4	Uji Asumsi Klasik	52
4.4.1	Uji Multikolinearitas.....	52
4.4.2	Uji Heterokedatisitas	53
4.4.3	Uji Normalitas	53
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
4.5.1	Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur	54
4.5.2	Pengaruh UMR Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur	55
4.5.3	Pengaruh UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur	56
BAB 5.	PENUTUP.....	58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		64

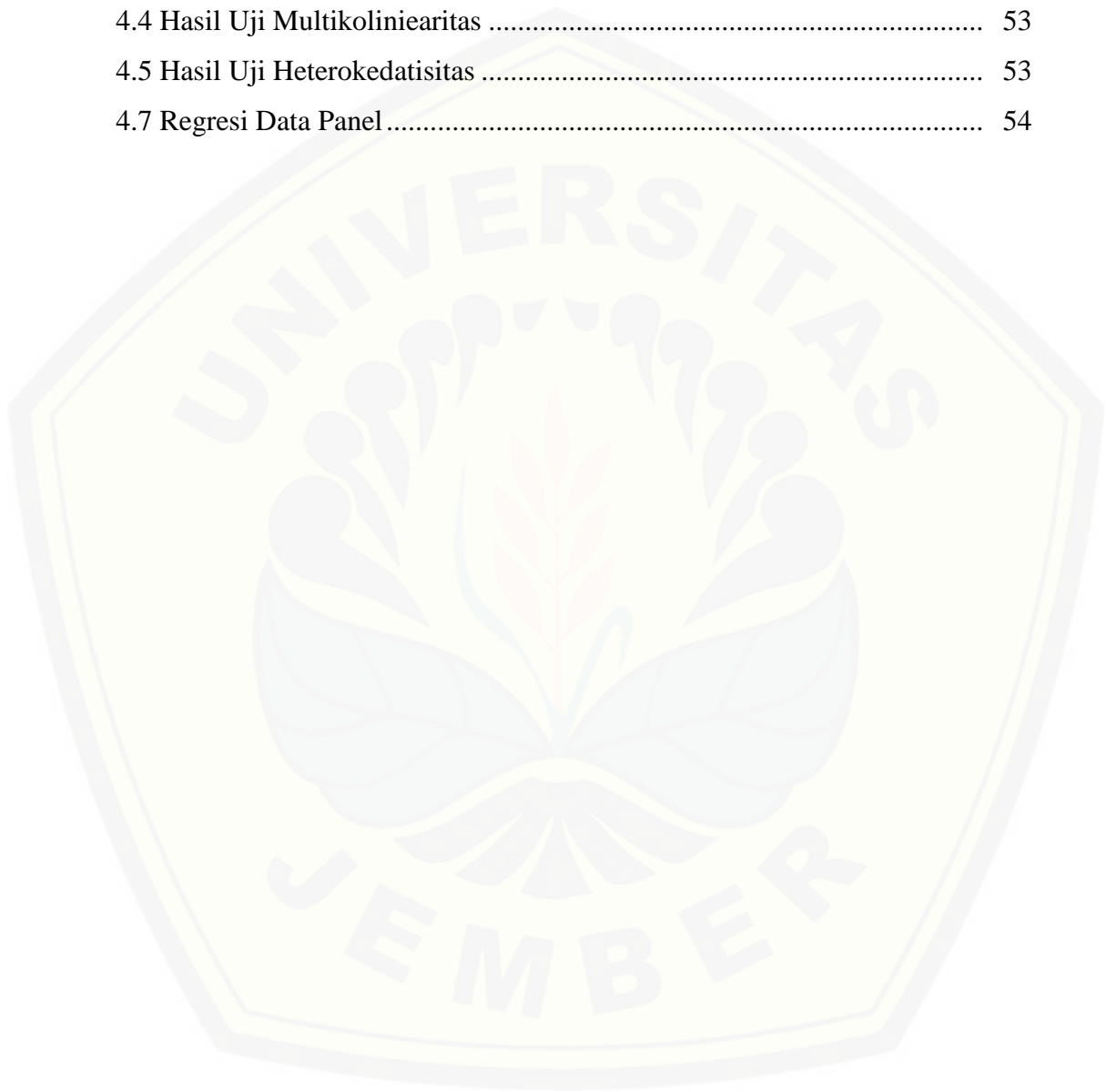
DAFTAR GAMBAR

1.1 TPT Jawa Timur Tahun 2009-2018.....	2
1.2 PDRB harga konstan tahun 2010-2016.....	4
2.1 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap	13
2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun.....	14
2.3 Fungsi Penawaran Tenaga Kerja.....	16
4.6 Uji Normalitas.....	54



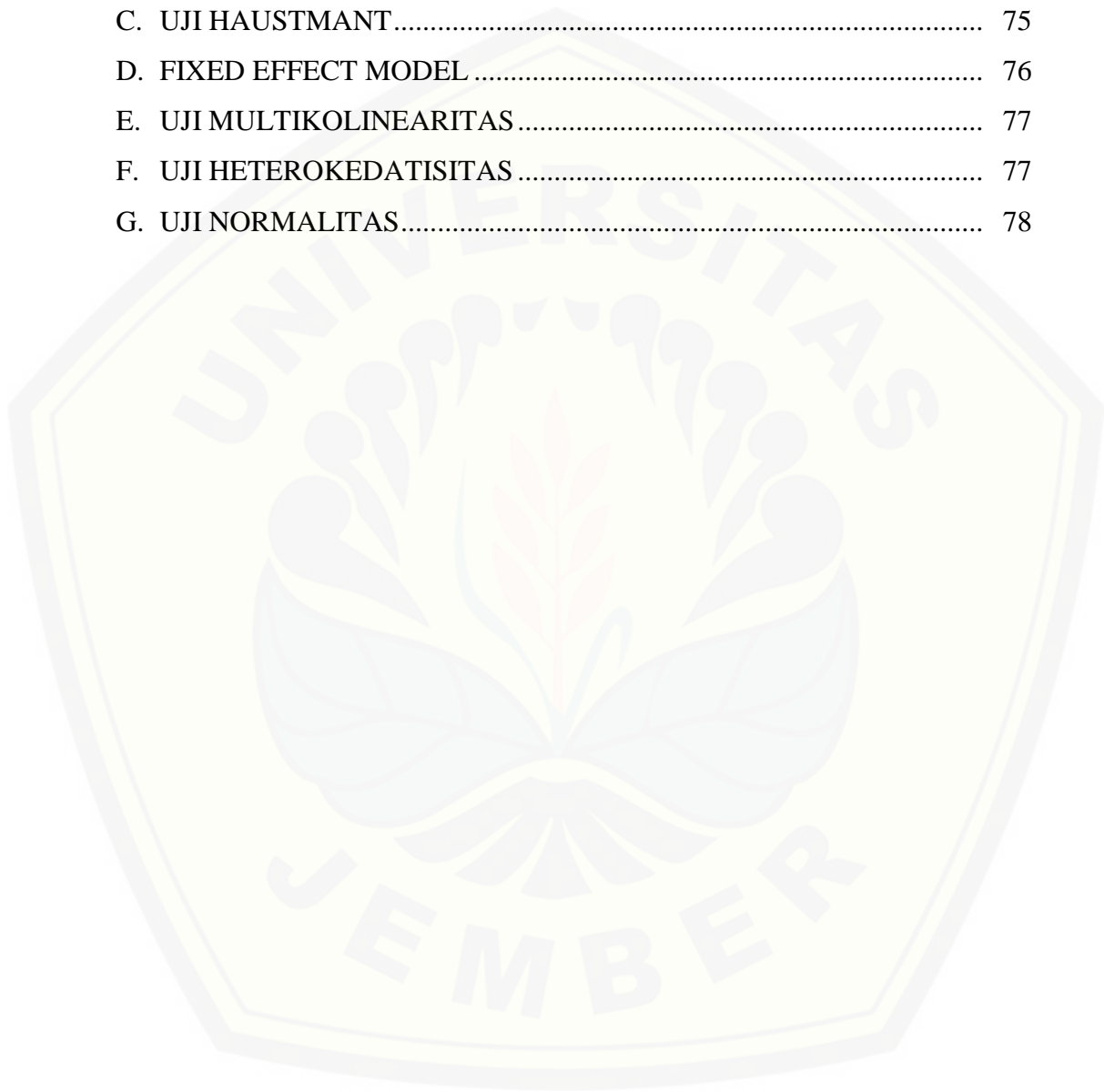
DAFTAR TABEL

4.1 Uji regresi Berganda	50
4.2 Hasil Uji Statistik	51
4.3 Hasil Uji F Statistik	52
4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	53
4.5 Hasil Uji Heterokedatisitas	53
4.7 Regresi Data Panel	54



DAFTAR LAMPIRAN

A. Data penyerapan tenaga kerja, PDRB, UMR, UKM di Provinsi Jawa Timur 2012-2017	64
B. DATA PANEL.....	74
C. UJI HAUSTMANT.....	75
D. FIXED EFFECT MODEL	76
E. UJI MULTIKOLINEARITAS	77
F. UJI HETEROKEDATISITAS	77
G. UJI NORMALITAS.....	78



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting didalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran, dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10).

Indonesia yang merupakan negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan salah satu modal terbesar negara Indonesia untuk mengejar ketinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud apabila pengolahan SDM dan SDA terlaksana dengan baik.

Suatu permasalahan akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung tenaga kerja yang ada. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula. Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009).

Penduduk memiliki dua potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Merujuk pada konsep demografi, penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih menjadi beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya.

Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur semakin jauh melampaui batas, maka timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas, sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa Timur yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Jawa Timur. Untung mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pengangguran, diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Informasi tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2015)

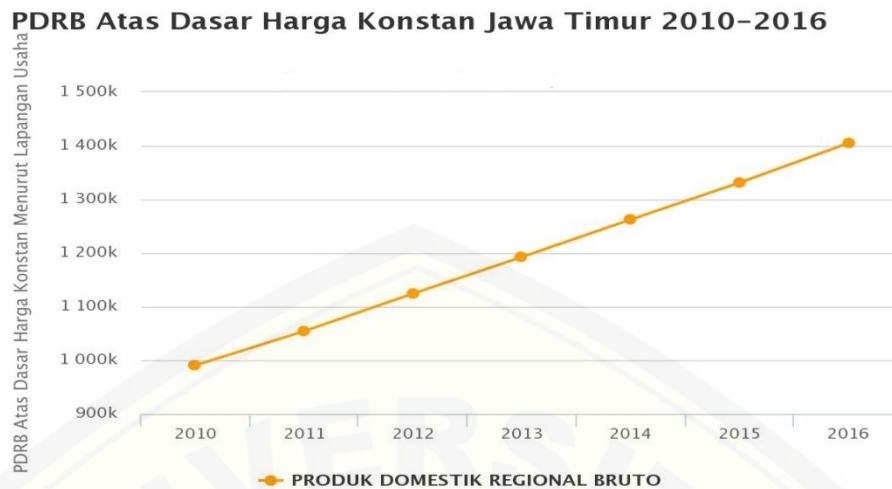


Tabel 1.1 TPT Jawa Timur Tahun 2009-2018
(sumber : Badan Pusat Statistik)

Pada tabel diatas dapat dijelaskan tingkat pengangguran di wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 5,08% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 4,25%. Namun pada tahun 2011 pengangguran di Jawa Timur mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding tahun 2009 yaitu 5,33%. Dan pada tahun 2012 tingkat pengangguran berkurang sebesar 4,09%, ditahun 2013 meningkat sebesar 4,30%, dan turun lagi pada tahun 2014 sebesar 4,19%. Dan pada tahun 2015 persentase meningkat sebesar 4,47%, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2018 konstan menurun hingga mencapai titik 3,99% pada tahun 2018.

Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu faktor penyebab ketidak seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang memadai. Sementara dari sisi persediaan juga memperlihatkan masih rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori kerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat juga.



Tabel 1.2 PDRB harga konstan tahun 2010-2016
(sumber : Badan Pusat Statistik)

Pada tabel 1.2 menjelaskan pada tahun 2010 PDRB provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan secara konstan hingga tahun 2016. Dengan meningkatnya PDRB di wilayah provinsi Jawa Timur, lapangan pekerjaan yang ada di Jawa Timur secara otomatis akan meningkat dan dapat membantu penyerapan tenaga kerja.

Selain nilai PDRB, nilai Upah Minimum Regional (UMR) juga merupakan kompensasi yang diterima oleh suatu unit kerja yang berupa jumlah yang dibayarkan kepada pekerja. Jika dilihat dari pemberi pekerjaan upah adalah beban perusahaan dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan pengangguran dalam permintaan tenaga kerja. Menurut Mankiw (2009) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran. Sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga kerja yang digunakan.

Bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan. Seperti yang telah dikemukakan oleh banyak pakar mengenai studi kota, bahwa penduduk akan bertempat tinggal di kota dan kawasan sekitar kota.

Menurut Mulyadi (2003), jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula, ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang akan mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat mencapai keadaan yang seimbang maka setidaknya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja.

Keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah pula dampak pada penyerapan tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwati, 2009:1), Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passy dan Taufik, 1990)

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat memengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar tenaga kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah

ketenagakerjaan (*enemployment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan memontum pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, maka salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Pengangguran masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur adalah pengangguran, yang anatara lain disebabkan tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya kualitas angkatan kerja, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur perlu didorong agar lebih berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas bagi kelompok setengah menganggur (*under employment*).

Penguatan ekonomi di Jawa Timur perlu dibangun dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan dan masyarakat kelas menengah. Penyerapan tenaga kerja terbanyak hingga saat ini masih ada pada sektor primer yaitu pertanian yang tingkat produktivitasnya cenderung rendah.

Namun mulai terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor sekunder dengan tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah bahwa pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder mengakibatkan perlunya tenaga kerja yang kompeten dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di sektor sekunder yang umumnya mensyaratkan keahlian tenaga kerja dalam tingkatan yang relatif tinggi.

Untuk kondisi Jawa Timur, pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan sekaligus pemberdayaan masyarakat kelas menengah menjadi potensi yang

menjanjikan. Sektor ekonomi kerakyatan terbukti kuat, tahan krisis dan menjadi penggerak pasar domestik. Sedangkan kelas menengah diberdayakan karena kelompok ini memiliki dasar pendidikan, produktivitas relatif tinggi, dan menghasilkan pencari kerja muda berpendidikan relatif tinggi. Kelas menengah ini bagi Jawa Timur merupakan dampak dari bonus demografi yang harus dikelola secara baik sehingga menjadi pendorong produktivitas dan bukan menjadi beban ekonomi masyarakat.

Menurut Todaro (2006) salah satu implikasi yang menonjol atas tingginya angka kelahiran di negara berkembang adalah hampir 40% penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Jadi angkatan kerja produktif di negara-negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak yang proporsional jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di negara-negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). Artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif (berumur 15-64 tahun). Menurut Asyad (2010), semakin tinggi presentase rasio beban tanggungan, semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan rasio beban tanggungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi.

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut dibutuhkan kajian mengenai ketenagakerjaan yaitu penyerapan tenaga kerja beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Maka, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur
2. Mengetahui pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur
3. Mengetahui pengaruh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih kepada peneliti sehingga mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta dapat memadukan dengan fakta yang ada di lapang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait penyerapan tenaga kerja sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan



BAB 2. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *human resources* mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja dan kelompok penduduk dalam usia kerja (*working-age population*) tersebut dinamakan tenaga kerja atau *man power*. Pengertian tersebut mengandung aspek kualitas dalam arti SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi.

Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Menurut BPS (2000), bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus-menerus selama seminggu yang lalu. Sementara yang dimaksud dengan mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Golongan yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar tenaga kerja sehingga kelompok ini dapat disebut juga sebagai angkatan kerja potensial.

Menurut Sawastha (2000) dalam Subekti (2007) tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu:

1. Tenaga Kerja Eksekutif. Tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinir dan mengawasi
2. Tenaga Kerja Operatif. Jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepadanya. Tenaga kerja operatif dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Tenaga kerja terampil (*skilled labour*)
 - b. Tenaga kerja setengah terampil (*semi skilled labour*)
 - c. Tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*)

2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atas instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Arfida BR, 2003).

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Karena orang membeli barang dan jasa karena barang tersebut memberikan kepuasan kepada pembeli karena untuk membantu memproduksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan konsumen akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* (Simanjuntak, 2001).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut, naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang., yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

2. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya

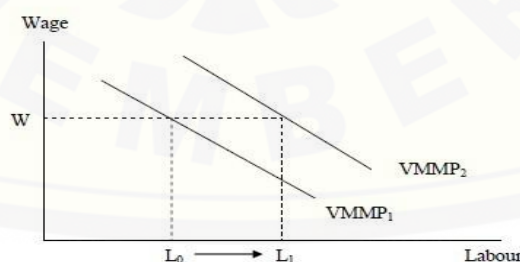
3. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Mengacu pada yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat

upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja, dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah orang yang ada di Jawa Timur.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat memengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal ini memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada: (1) tambahan hasil marginal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga kerja (MPPL), (2) penerimaan marginal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue* (MR). Penerimaan marginal disini merupakan besarnya tambahan hasil marginal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = VMPP = MPPL \cdot P$ dan (3) biaya marginal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama *Marginal Revenue* (MR) lebih besar dari tingkat upah.

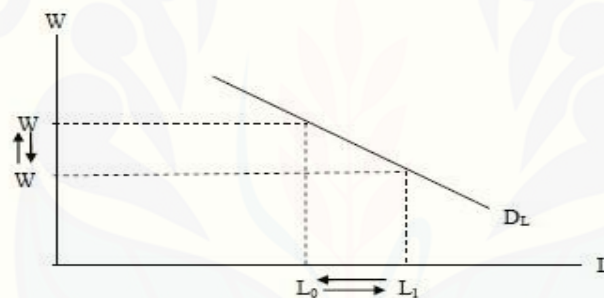


Gambar 2.1 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap (Sumber: Bellante and Jackson, 1990)

Value Marginal Physical Product of Labour (VMPP) adalah nilai pertambahan hasil marginal dari tenaga kerja. P adalah harga jual barang per unit, DL adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah jumlah

tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja terhadap tenaga kerja tergantung dari permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsi. Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap (Gambar 2.1)

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisme, sedangkan dalam jangka panjang jumlah permintaan akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.



Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun (Sumber: Bellante and Jackson, 1990)

Pengusaha akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja tergantung dari tingkat upahnya. Jika tingkat upah mengalami penurunan, maka pengusaha akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan tingkat upah dapat dilihat pada Gambar 2.2 Kurva DL melukiskan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja (VMPPL) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan antara tingkat upah (W) dan penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik L_1 dan L . Pada gambar 2.2 terlihat bahwa pada kondisi awal tingkat upah berada pada W_1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan L_1 . Jika tingkat upah diturunkan menjadi W , maka tenaga kerja yang diminta meningkat menjadi L .

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah barang tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Sukirno, 2004).

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang mempekerjakan banyak orang yang umumnya menghasilkan barang atau jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda, demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja

2.1.4 Penawaran Tenaga Kerja

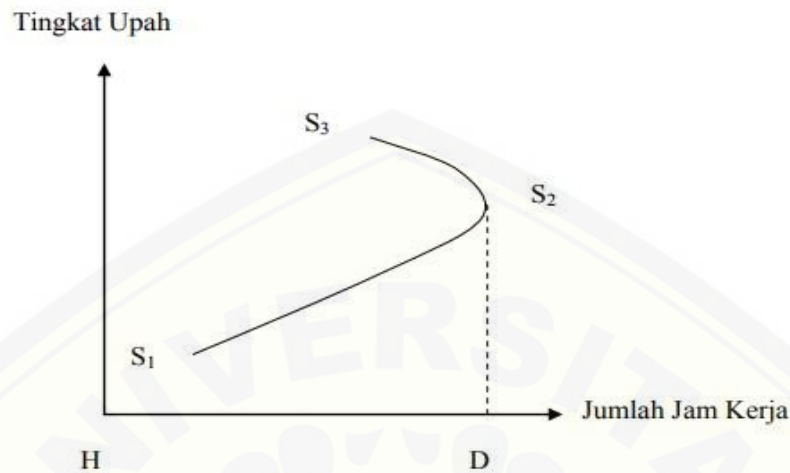
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak.

Menurut G.S Becker (1997), kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak.

Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya santai (tidak produktif tetapi konsumtif), atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula dengan tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah

cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang alokasikan untuk bekerja (Sumarsono, 2003).



Gambar 2.3
Fungsi Penawaran Tenaga Kerja (Sumber: Simanjuntak, 2001)

Pada gambar 2.3 terdapat kurva yang menggambarkan pertumbuhan tingkat upah atau yang dinamakan *Backward Bending Supply Curve*. *Backward Bending Supply Curve* atau biasa disebut kurva tenaga kerja membalik ini hanya dapat terjadi pada penawaran tenaga kerja yang bersifat perorangan. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas, semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi (Mahendra, 2014).

2.1.5 Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut (Sudarsono, 1990:147). Pasar kerja merupakan seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, yaitu pengusaha atau

produsen, pencari kerja, perantara atau pihak ketiga dimana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Pihak ketiga bisa pemerintah, lembaga informal atau formal, konsultan, dan badan swasta. Sedangkan menurut Simanjuntak (2001: 101), pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang memepertemukan pencari kerja dan lowongan kerja.

Menurut Suroto (1992: 193) masalah dalam pasar kerja pada dasarnya dapat disebut sebagai ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat digolongkan dalam 3 kelompok yaitu:

1. Masalah kelebihan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih besar daripada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat.
2. Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja daripada kebutuhan.
3. Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat, akan tetapi nyatanya karena adanya suatu rintangan, keduanya tidak bertemu pada tempat waktu yang sama. Disini masalahnya terletak dalam mekanisme penyalurannya.

2.1.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif.

Menurut Irianto (1996) dalam perekonomian nasional, industri kecil merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menopang ekspor nonmigas, dan memperkuat struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industri kecil mempunyai peranan yang sangat kuat dalam mendorong restrukturisasi pedesaan kearah yang lebih berkembang, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran

industri dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di perkotaan dan pedesaan.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang undang ini.

Kelebihan dan Kekurangan UKM adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan
 - a. Organisasi internal sederhana.
 - b. Mampu meningkatkan ekonomi kemasyarakatan / padat
 - c. Relatif aman bagi perbankan dalam pemberian kredit.
 - d. Bergerak dibidang yang cepat menghasilkan.
 - e. Mampu memperpendek rantai distribusi.
 - f. Fleksibilitas dalam pengembangan usaha.
2. Kekurangan
 - a. Lemah dalam kewirausahaan dan menejerial.
 - b. Keterbatasan ketersediaan keuangan.
 - c. Ketidakmampuan pemenuhan aspek pasar.
 - d. Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi.
 - e. Ketidakmampuan informasi.
 - f. Tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai
 - g. Tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama

2.1.7 Klarifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UKM tersebut, yaitu pertama, kepemilikan; kedua, operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal; ketiga, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat, ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerja atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partomo dan Soejodono, 2004).

Menurut partomo dan soejodono (Rahmana 2010), UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafka, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

2.1.8 Teori Upah

Malthus dan John Stuart Mills merupakan tokoh klasik yang mempunyai kesan pesimisme terhadap tingkat upah yang hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Malthus berpendapat apabila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah tetapi dengan berkurangnya jumlah penduduk justru akan mengangkat tingkat upah ke atas ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. Sama halnya dengan John Stuart Mills yang menyebutkan pada saat investasi sudah dilakukan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi, tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut.

Pembaharuan teori upah dilakukan oleh sebagian kelompok mazhab neoklasik yang mencoba untuk menghilangkan sikap pesimisme. Dan beranggapan bahwa tingkat upah dapat saja tinggi asal sesuai dengan produk marginalnya. Menurut mazhab ini, tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal dan kemungkinan tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen karena tingkat upah juga tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktivitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 30 menyebutkan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa kerja yang diberikannya bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natural. Dalam penelitian ini digunakan upah minimum untuk mengetahui bagaimana upah memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring naiknya upah nominal kesejahteraan (upah riil).

Upah minimum memiliki efek buruk pada pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran, ketika undang-undang upah minimum diberlakukan, pengangguran akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena upah menjadi mahal daripada apa yang telah mereka anggarkan sebelumnya (C. Campbell, 2005)

2.1.9 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengarah kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

A. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan memengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan

membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal.

B. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hamper pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = K = n$$

Dimana :

G : Growth (tingkat pertumbuhan output)

K : Capital (tingkat pertumbuhan modal)

N : Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

C. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya.

Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli.

Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta.

Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada tiga pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi yaitu:

1. Ekonomi baru
2. Menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal
3. Timbulnya proses peniruan (imitasi) dari pengusaha-pengusaha lain

2.1.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor

produksi lainnya berasal dari mana. Sedangkan wilayah dosmetik meliputi region yang berada di dalam wilayah geografis daerah tersebut. Selanjutnya, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalm suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan (BPS, 2016).

Terdapat juga pendekatan dalam menghitung PDRB suatu darah, yaitu menurut pendekatan produksi, menurut pendekatan, dan mneurut pendekatn pengeluaran. Sedangkan PDRB terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang dihitung dari jumlah nilai produksi atau pendapatan/pengeluaran dan nilai tambah barang dan jasa yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan atau menggunakan harga pada tiap tahun.
- b. PDRB atas dasar konstan merupakan PDRB yang dihitung dari jumlah nilai produksi atau pendapatan/pengeluaran dan atau nilai tambah barang dan jasa yang dinilai sesuai dengan harga tahun dasar (harga tetap) dalam satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan ini yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun dan sejauh mana pemerintah berhasil dalam melaksanakan proses pembangunan ekonominya.

2.2 Pengaruh Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mngalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya.

Terjadinya pertumbuhan eekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja

(*unemployment rate*). Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (kapital= K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dipakai (A). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi), dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model berikut (Todaro, 2000).

$Y=AF(K,L)$ dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L , atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang memengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A . Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas. Dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$Y=(LS + RL) + (KS + RK) + A$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan output (*Output growth*)

LS = Kontribusi tenaga kerja (*Labor share*)

RL = Pertumbuhan tenaga kerja (*Labor growth*)

KS = Kontribusi modal/kapital (*Capital share*)

RK = Pertumbuhan modal/kapital (*Capital growth*)

A = Teknologi (*Technological progress*)

2.2.2 Pengaruh UMR Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah diartikan sebagai jumlah dana yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan pekerjaannya yaitu menghasilkan produk. Upah yang terus meningkat secara langsung akan membawa dampak yang signifikan pada penawaran tenaga kerja, karena dengan adanya tingkat upah yang dinaikkan tersebut para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan atau

menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit usaha, pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerjanya.

Menurut Sumarsono (2003:106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya konsumen memberikan respon cepat apabila terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi bahkan tidak lagi membeli barang yang bersangkutan.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang lainnya tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksi dan menggantikan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam uraian diatas Sudarsono (1998:35) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian dari upah adalah hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dari/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kaum ekonomi klasik menyatakan, bahwa tenaga kerja/karyawan mendasarkan penawaran tenaga kerja atas upah riil (W/P). Oleh karena itu, kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran tenaga kerja apabila kenaikan tersebut disertai dengan kenaikan tingkat harga yang sepadan.

Burt (1963) dalam bukunya yang berjudul “ *Labor Market, Unions and Government Policies*” menyatakan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang memengaruhi upah pekerja, diantaranya:

1. Teori Kebutuhan Hidup (*Subsistance Theory*)

Salah satu teori upah yang paling tua adalah teori kebutuhan hidup yang dikemukakan David Ricardo. Teori ini secara sederhana mengemukakan bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Keadaan upah di pasar tenaga kerja akan berfluktuasi di sekitar *subsistance level*. Penawaran tenaga kerja tidak akan meningkat atau menurun dalam hubungan jangka panjang (*long run*). Jika tingkat upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada dibawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja dan kemudian tingkat upah akan naik menuju *subsistance level* kembali

2. Teori Upah Besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, yang menyatakan bahwa dengan adanya *subsistance theory* kepentingan pekerja tidak terlindungi. Oleh karena itu peran serikat pekerja dalam melindungi kepentingan pekerja menjadi hal sangat penting.

Teori ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya

3. *Wage Fund Theory*

Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tingkat upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan tabungan akan meningkatkan nilai investasi pada sektor-sektor ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi tersebut berupaya meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja.

4. *Marginal Productivity Teory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut.

Menurut Mankiw (2006) kelakuan upah riil menyebabkan penjahatan pekerjaan. Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium (pada WI), maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaan akibatnya adalah pengangguran. Kekakuan upah ini terjadi sebagai akibat dari undang-undang upah minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan diatas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimum yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawan. Kebijakan upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak pada pengangguran dengan usia muda (Mankiw, 2007).

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Haryo Kuncoro (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Haryo Kuncoro tahun 2013 dengan judul “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”. Menggunakan alat analisis *Error Corection Model (ECM)*. Variabel yang digunakan yaitu jumlah tenaga kerja yang diserap, upah, output, variabel *dummy*, dan perubahan teknologi. Hasil penelitian ini adalah variabel upah lebih besar berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di industri tembakau daripada industri alas kaki, hal ini disebabkan industri tembakau bersifat padat karya dan pada industri alas kaki walaupun cukup menyerap banyak tenaga kerja namun input modal masih tetap dominan dan output signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.3.2 Abdul Karib (2012)

“Analisis Pengaruh Produksi, Modal dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat”, model yang telah di rumuskan akan di regres untuk mengestimasi persamaan tersebut dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, dengan menggunakan data sekunder dalam menganalisis yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas perindustrian dan perdagangan Sumatera Barat (Sektor Industri dalam angka 1997-2008).

Hasil analisis data menunjukkan sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel nilai produksi, nilai modal dan jumlah unit usaha.
2. Nilai produksi, nilai modal, dan jumlah unit usaha merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat tahun 1997-2008.
3. Variabel produksi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat. Variabel produksi memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja.
4. Variabel modal merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat. Variabel modal memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja.
5. Variabel jumlah unit usaha merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat.

2.3.3 Nenek Woyanti dan Ayu Wafi Lestari (2011)

“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Modal, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang”. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel unit usaha, nilai modal, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.

2. Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

Variabel nilai modal pada Industri Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

2.3.4 Achmad Hendra Setiawan (2010)

“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang”. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data runtut waktu (*time series*) selama periode 1993-2007. Data mengenai jumlah tenaga kerja dan UMK diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang, sedangkan data mengenai jumlah unit usaha nilai modal dan nilai output berasal dari Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha nilai modal, nilai output dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai modal, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai output memiliki pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang lain.

1.3.5 Ariyanto (2010)

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time*

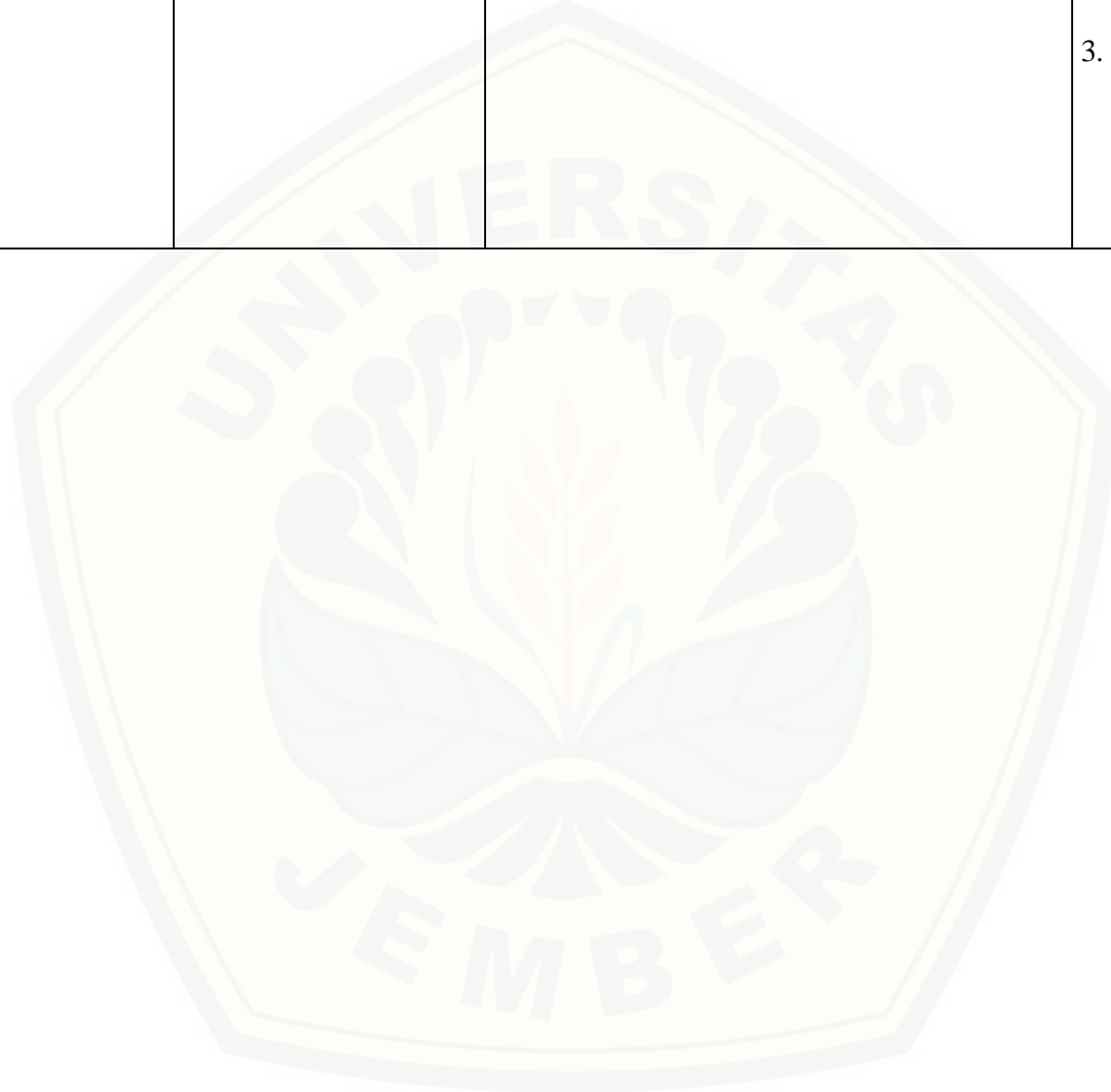
series) antara tahun 1985-2007. Pencarian data terutama pada berbagai sumber atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*).

Berdasarkan hasil analisis ECM (*Error Correction model*), dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, nilai ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

no	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haryo Kuncoro (2013)	“Upah sistem Bagi Penyerapan Tenaga Kerja”	<p>Dependen: Jumlah Tenaga Kerja yang terserap.</p> <p>Independen: upah output variabel dummy, perubahan</p>	Error corection Model (ECM)	Variabel upah lebih besar pengaruhnya pada penyerapan tenaga kerja di industri alas kaki, hal ini disebabkan industri tembakau bersifat padat karya dan pada industri alas kaki walaupun cukup menyerap banyak tenaga kerja namun input modal masih tetap dominan dan output signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja
2	Abdul Karib (2012)	“Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, dan unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Sumatra Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi 2. Investasi 3. Unit Usaha 4. Penyerapan Tenaga Kerja 	Model yang telah dirumuskan akan diregresi untuk mengestimasi persamaan tersebut dengan menggunakan model OLS, dengan menggunakan data skunder dalam menganalisis yang di peroleh dari berbagai sumber seperti BPS, Dinas Perindustrian dan perdagangan Sumatra barat	<p>Hasil analisis ini menunjukkan sebagai berikut</p> <p>Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri Sumatra Barat dipengaruhi oleh variabel nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. produksi, nilai investasi dan jumlah unit usaha 2. Nilai produksi, nilai investasi dan jumlah unit merupakan faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri di Sumatra Barat

3	Nenik Woyanti dan Ayu Wafi Lestari (2011)	"Pengaruh Jumlah Usaha, nilai Modal, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Tenaga Kerja 2. Unit Usaha 3. Nilai Investasi 4. Upah Minimum Kabupaten 	Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang. Secara parsial upah minimum kabupaten berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja
4	Achmad hendra setiawan (2010)	"Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah unit usaha 2. Investasi 3. Nilai Output 4. Upah minimum 	Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan model kuadrat terkecil (OLS)	Jumlah tenaga kerja unit usaha, nilai investasi dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja
5	Arianto (2010)	"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 1985-2007"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Tenaga kerja 2. PDRB 3. Pengeluaran Pemerintah 4. Ekspor 	Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kepustakaan, data sekunder, dengan menggunakan data deret waktu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan ECM	Berdasarkan hasil ECM, dapat disimpulkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 2. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga

					kerja 3. Nilai ekspor mempunyai pengaruh negatif pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah dalam jangka panjang dan jangka pendek
--	--	--	--	--	---

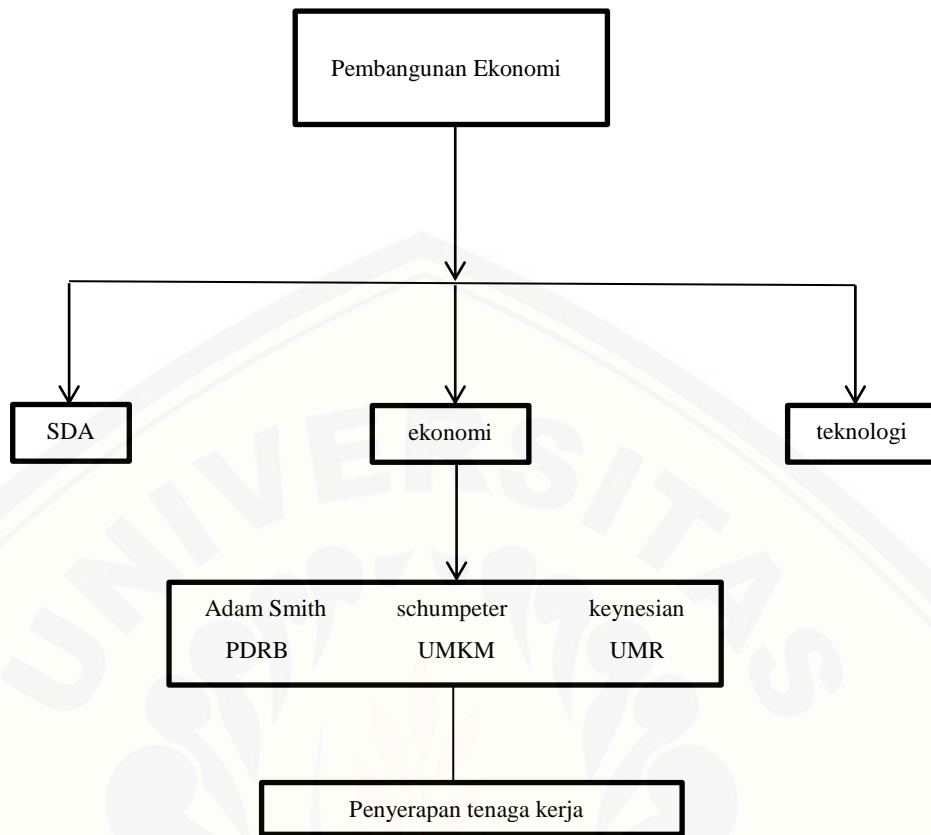


2.4 Kerangka Konsep

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith (1776) pertama kali dijabarkan dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*, dimana dalam buku tersebut, Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi secara sistematis.

Inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibagi dalam dua aspek yakni pertumbuhan output total dan penambahan penduduk. Pertumbuhan output total terdiri atas sumber daya alam yang tersedia atau tanah, sumber daya manusia, dan stok barang modal yang ada. Sedangkan penambahan penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith adalah jika terjadi tarik menarik antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. (Arsyad, 1992: 49- 51). Tingkat upah yang tinggi akan terjadi bila jumlah permintaan tenaga kerja lebih tinggi dibanding jumlah penawaran tenaga kerja (Suryana, 2000:53).

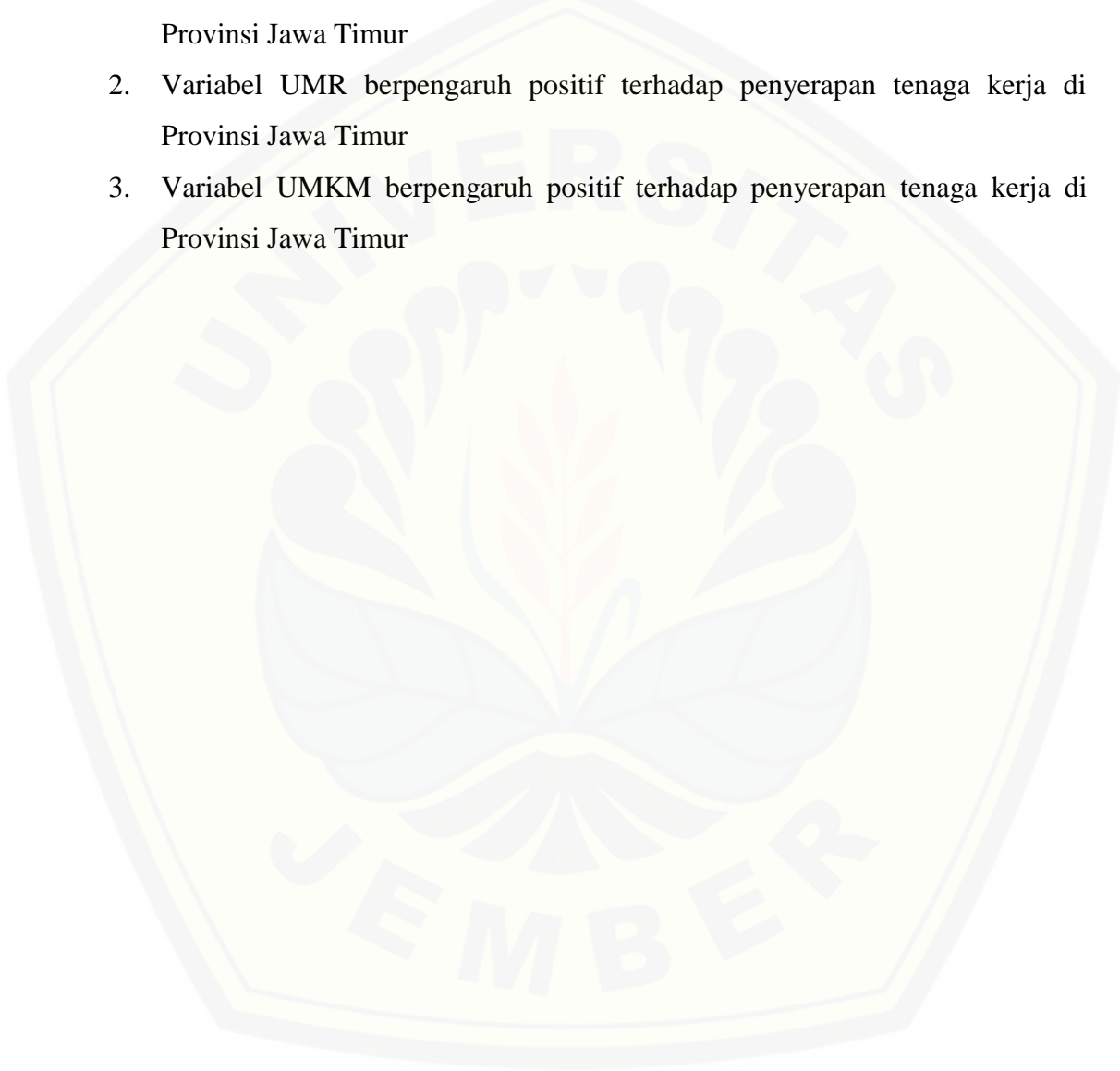
Tingkat upah dapat memengaruhi permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Pada kenyataannya, para pekerja ini tidak diperkerjakan bukan hanya karena mereka aktif mencari pekerjaan, namun pada tingkat upah tertentu terjadi penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya, sehingga para calon tenaga kerja tersebut hanya menunggu pekerjaan tersedia (Mankiw, 2003:4).



2.5 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini rumusan masalah pertama hingga ketiga perlu menggunakan hipotesis. Yaitu sebagai berikut :

1. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur
2. Variabel UMR berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur
3. Variabel UMKM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur



BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjelaskan konstruksi mulai dari data, hingga metode analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Hasil analisis akan menggambarkan pergerakan dan estimasi tiap variabel yang akan digunakan untuk menjelaskan pembahasan penelitian menggunakan analisis kuantitatif.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggambarkan fakta-fakta mengenai masalah-masalah atau fenomena penelitian yang bersifat nyata melalui interpretasi data rasional dan akurat (Nawawi, 2005:63). Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan format struktur seperti matematika dan statistik. Semua data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik inferensial maupun noninferensial (Bungin, 2013:113).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2017 menggunakan data dari Badan Pusat Statistik

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data publikasi dari BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS disetiap kabupaten baik data PDRB, tenaga kerja UMR, UMKM serta data sektor lainnya sekaligus catatan teori dan buku-buku referensi dari letaratur

3.4 Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Model Analisis Regresi Data Panel, Uji Statistik, dan uji Asumsi Klasik.

3.5 Metode Analisis Regresi Data Panel

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah riil yaitu analisis data panel, dimana merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan deret hitung (*cross section data*). Model persamaan variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dan menjadi model ekonometrika sebagai berikut :

$$T_{kit} = \alpha_{oi} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMR_{it} + \beta_3 UMKM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Tk = Penyerapan Tenaga Kerja

α = konstanta

i = Kabupaten

t = Waktu

β_1 = koefisien PDRB

β_2 = koefisien UMR

β_3 = koefisien UMKM

X1 = PDRB

X2 = UMKM

X3 = UMR

Et = Variabel Pengangguran

(Yana Rohmana 2010:236)

Fungsi diatas menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja yang diukur dipengaruhi oleh PDRB, UMR, dan UMKM, sedangkan alpha nol merupakan konstanta. Diasumsikan bahwa variabel lain diluar penelitian tidak berubah.

Analisis data menggunakan regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya:

1. Data panel merupakan gabungan dua data yaitu time series dan cross section sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.

2. Menggabungkan informasi data time series dan cross section mampu mengatasi masalah penghilangan variabel (widarjono,2009)

3.5.1 Uji *Hausmant Test*

Hausmant tes merupakan pengujian statistic untuk memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Uji hausmant memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-Square statistics*. Uji *Hausmant* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = \text{Model Random Effect}$

$H_1 = \text{Model Fix Effect}$

Jika *Chi-Square* hitung $>$ *Chi-Square table* dan probabilitas hitung $<$ $\alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga model Fixed Effect lebih tepat digunakan. Apabila *Chi-Square* $<$ *Chi-Square* dan probabilitas hitung $>$ $\alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga model Fixed Effect tepat digunakan.

3.5.2 Uji Statistik

Uji statistik dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kenyataan. Pada penelitian ini diajukan tiga hipotesis yang masing-masing akan diuji dengan cara tersendiri yaitu uji F dan uji t dan uji determinasi berganda (R^2)

A. Uji F statistik

Uji F ini digunakan untuk mengetahui hubungan secara serentak antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan formulasi yang digunakan adalah:

$$F_{hit} = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien Determinasi

N = jumlah observasi

k = banyaknya variabel

(Supranto, 2001:267)

Dengan Perumusan Hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

$$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; artinya secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian dari hasil regresi juga dapat dilihat probabilitasnya:

- a) Jika probabilitas $F_{Hitung} \leq$ tingkat signifikansi (α) 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh antar variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
- b) Jika probabilitas $F_{Hitung} >$ tingkat signifikansi (α) 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh antar variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

B. Uji t statistik

Uji t atau uji secara parsial, digunakan untuk mengetahui apakah secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah H_0 ditolak atau H_a diterima jika nilai signifikansi t atau P value $< 10\%$.

Rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_1}{s\beta_1}$$

Keterangan :

β_1 = koefisien regresi

$s\beta_1$ = standart error dari koefisien regresi

(Supranto, 2001:267)

Dengan perumusan hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Artinya variabel bebas parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

$$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

artinya variabel bebas parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Kriteria Pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha 5\%$) = 0,1 maka:

- a) Jika probabilitas $T_{hitung} \leq$ tingkat signifikansi ($\alpha 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat;
- b) Jika probabilitas $T_{hitung} >$ tingkat signifikansi ($\alpha 5\%$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti ada tidak ada pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

C. Uji Determinasi Berganda (R^2)

Uji Determinasi Berganda (R^2) digunakan untuk mengukur mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 2005:125). Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase.

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi berganda

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = Jumlah Kuadrat Residual

TSS = ESS + RSS

(Santosa&Ashari, 2005:125)

3.6 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati (1997:169), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Permasalahan dari multikolinieritas adalah adanya korelasi antar variabel independen dalam model empiris. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai $VIF \geq 10$ (jika nilai *tolerance* $\leq 0,01$) maka antara variabel pendidikan kepala keluarga, curah jam kerja, masa kerja, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja terjadi multikolinieritas. Dan sebaliknya apabila nilai $VIF \leq 10$ (jika nilai *tolerance* $\geq 0,01$) maka pada variabel pendidikan kepala keluarga,

curah jam kerja, masa kerja, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu juga, jika dilihat dari *Rule of thumb*, apabila nilai korelasinya $\geq 0,8$ maka diduga ada gejala multikolinieritas dan begitu pula sebaliknya

B. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser (Glejser Test)* atau uji *Park (Park Test)*. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah uji *Glejser*.

Menurut Gujarati (1997:187) pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glajser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas. Apabila hasil regresi absolut terhadap seluruh variabel bebas mempunyai nilai t hitung yang tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa model penelitian lolos dari adanya heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Pedomana dari J-B test adalah:

1. Bila nilai *Jarque-berra* hitung $>$ nilai X^2 - tabel atau nilai probabilitas *Jarque berra* hitung $<$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$) maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, u_t adalah berdistribusi normal ditolak
2. Bila nilai *Jarque-berra* hitung $<$ nilai X^2 - tabel atau nilai probabilitas *Jarque berra* hitung $>$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$) maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, u_t adalah berdistribusi normal diterima

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dan penjelasan mengenai istilah dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi atau perspektif yang berbeda serta menyamakan pandangan peneliti dan pembaca untuk menghindari melebarnya pembahasan, definisi tersebut antara lain :

1. Penyerapan Tenaga Kerja berupa jumlah dari angkatan kerja yang dapat terserap dalam kegiatan ekonomi (produksi). Pendekatan variabel ini dengan menghitung jumlah penduduk di Jawa Timur berusia di atas 15 tahun yang bekerja. Bekerja diartikan segala kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan setidaknya selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Selama satu jam tersebut pekerjaan harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup orang yang sedang bekerja dan juga yang punya pekerjaan tapi tidak bekerja untuk sementara seperti: cuti, cuti sakit, menunggu panen dan sebagainya (dalam satuan persen / tahun)
2. Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi semua sektor perekonomian di setiap provinsi di Provinsi Jawa Timur dengan melihat nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 (dalam satuan miliar / tahun).
3. Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum yang digunakan oleh para pelaku industri untuk memberikan upah kepada pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Kota yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum regional tahunan yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur periode 2012-2017.
4. Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) adalah suatau bentuk kegiatan yang dilakukan orang masyarakat untuk membangun ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.



4. Pemerintah harus bijaksana dalam memprioritaskan pembangunan daerahnya, terutama untuk dapat memberikan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan serta pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata



Daftar Pustaka

- Abipraja, Soedjono, 2002. *Perencanaan pembangunan di Indonesia : konsep,model,kebijaksanaan,instrumen serta strategi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Abdullahi, Idris Isyaku. 2016. Does Peverty Influence Prevalence if Child Labor in Developing Countries?. *Jurnal Internasional*. Malaysia : University Putra Malaysia
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah* Penerbit Graha Ilmu.
- Arfida, B.R. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Arfida, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur dalam angka 2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia 2011-2015*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Jawa Timur dalam angka 2012*. Surabaya: Badan Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Timur Dalam Angka 2015*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Bellante,Don dan Mark Jackson, 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

- Boediono, 1999. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Dimas. Nenik Woyanti. 2009. “*Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16 No. 1. Hal. 32-41.
- Dimas. Nenik Woyanti. 2009. “*Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16 No. 1. Hal. 32-41.
- Gary, S. Becker. 1997. *The Economics Approach to Human Behavior*. Links to chapter previews. University of Chacago Press.
- Gujarati, D. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Haryo Kuncoro. 2013. “*Upah Sistem Bagi Hasil & Penyerapan Tenaga Kerja*”. Universitas Islam Indonesia.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mahendra, Adya Dwi. 2014. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.G. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. S. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Grafindo Persada.

- M.Taufik Zamrowi. 2007. "*Pengaruh Struktur Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil (Studi di Industri Mebel di Jawa Tengah)*". Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pratomo, D. S. dan Adi Saputra, P. M. 2011. Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkadil: Tinjauan UUD 1945. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya. *Journal of Indonesian Applied Economisc*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-285
- Prabowo, Azis 1997, "*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Tegal*", Skripsi, FE Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis Ekonomi (JEB), Maret 2009, Hal. 50 – 69 Vol. 16, No.1. ISSN: 1412-3126. Universitas Diponegoro Semarang.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI
- Subekti. 2007. *Pengaruh Upah Riil Terhadap Penyerapan tenaga kerja*. Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia Pada eprints.undip.ac.id/1680/1/Subekti.pdf
- Sudarsono.1995 *teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: LP3ES.
- Sudarsono.1998. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Sukirno Sadono. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, S. 2000. *Teori Pengantar Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno Sadono. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Sumarsono, Sony. 2003. "*Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*". Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simanjuntak, P. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi UI.
- Todaro, Michael P., 2000a, *Economic Development*, Seventh Edition, Addison Wesley, England
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN A

Data penyerapan tenaga kerja, PDRB, UMR, UKM di Provinsi Jawa Timur 2012-2017

kota	tahun	Tenaga Kerja (Per Jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR /bulan (juta rupiah)	UKM (unit)
Kabupaten Pacitan	2012	342.849	8477.6	1250320	120253
	2013	343.078	9416.3	1400093	127756
	2014	349.055	10492.2	1670442	134481
	2015	353.172	11590.6	1198246	151272
	2016	352.292	12767.1	1283000	179541
	2017	353.845	13810.3	1388847	181115
Kabupaten Ponorogo	2012	499.650	11047.6	1521304	171254
	2013	490.113	12153.6	1604984	179254
	2014	496.443	13394.1	1501542	180575
	2015	485.245	14916.0	1411937	187025
	2016	506.848	16419.2	1283000	195723
	2017	505.250	17760.4	1388847	207561
Kabupaten Trenggalek	2012	412.033	9969.2	1220417	115752
	2013	414.400	11007.9	1352547	124658
	2014	339.084	12297.0	1293381	135795
	2015	404.547	13634.8	1056403	137520
	2016	398.417	14915.8	1283000	140358
	2017	416.509	16116.7	1388887	143455
Kabupaten Tulungagung	2012	553.749	21018.7	1098057	115768

	2013	551.362	23255.3	1234013	124698
	2014	565.151	25780.6	1009183	148964
	2015	547.466	28415.3	1301805	152185
	2016	537.081	31126.1	1420000	168975
	2017	569.310	33740.2	1537150	181409
Kabupaten Blitar	2012	636.500	19868.5	885121	209836
	2013	626.254	21755.2	1132315	219248
	2014	606.076	24140.6	1148410	221505
	2015	597.639	26779.7	1195167	239511
	2016	638.135	29335.6	1405000	250896
	2017	638.460	31654.9	1520912	255622
Kabupaten Kediri	2012	801.966	22590.1	1134409	186542
	2013	791.101	2510.2	1404240	215648
	2014	785.650	27755.2	1288162	224684
	2015	800.894	30497.5	1263646	236184
	2016	853.996	33212.4	1456000	249845
	2017	818.385	35870.6	1576120	251493
Kabupaten Malang	2012	1.328.223	52796.8	1196084	351435
	2013	1.310.685	58674.7	1183584	354321
	2014	1.273.597	65930.9	1211978	381546
	2015	1.292.343	74841.9	1247118	399651
	2016	1.318.611	81785.4	2188000	409548
	2017	1.399.610	89180.2	2368510	414516
Kabupaten Lumajang	2012	526.129	17783.3	908463	162153

	2013	515.451	19637.0	1141207	175125
	2014	514.666	211983.1	1024381	183215
	2015	532.005	24417.1	918805	187456
	2016	515.516	26652.8	1437000	194218
	2017	553.923	28709.3	1555552	196446
Kabupaten Jember	2012	1.149.629	41327.1	904186	379514
	2013	1.169.366	45055.5	983390	383230
	2014	1.157.462	50602.1	945869	394621
	2015	1.173.139	56377.4	1007079	409624
	2016	1.281.242	62513.7	1629000	415763
	2017	1.276.672	67476.1	1763392	424151
Kabupaten Banyuwangi	2012	882.062	42108.3	994442	259120
	2013	879.516	47364.7	977505	268691
	2014	841.190	53371.2	1257888	270548
	2015	849.816	60179.3	1207374	276416
	2016	906.735	66348.5	1599000	284656
	2017	903.356	72245.7	1730917	296706
Kabupaten Bondowoso	2012	410.708	10634.1	1154548	149250
	2013	394.186	11792.6	1169120	157098
	2014	416.745	13075.1	1180781	157651
	2015	424.851	14485.6	1177920	160865
	2016	444.322	15862.6	1417000	167215
	2017	436.530	17156.7	1533902	172378
Kabupaten Situbondo	2012	358.182	10708.2	890689	131507

	2013	355.849	11912.8	1156904	137682
	2014	348.549	13338.8	1247344	140985
	2015	364.834	14795.7	948439	148324
	2016	383.017	16280.8	1374000	154895
	2017	390.244	17545.0	1487355	156727
Kabupaten Probolinggo	2012	636.680	18796.8	1354463	198682
	2013	618.642	20830.9	1427047	200681
	2014	601.353	23158.0	1385743	204681
	2015	601.681	25688.6	1258387	215686
	2016	590.934	28069.4	1736000	224586
	2017	612.763	29993.7	1879220	235286
Kabupaten Pasuruhan	2012	819.111	77659.9	1197171	189214
	2013	831.812	84942.6	1332406	191520
	2014	843.685	94881.6	1433725	205987
	2015	815.028	104778.4	1607026	218688
	2016	819.322	114882.8	3037500	239812
	2017	864.530	124979.8	3288093	248802
Kabupaten Sidoarjo	2012	1.012.290	105855.9	1661293	130956
	2013	1.039.988	117743.3	2023986	138498
	2014	1.069.709	131645.8	2433187	148624
	2015	1.083.519	146080.9	2402298	159015
	2016	1.075.359	16620.7	3040000	168461
	2017	1.094.460	174280.1	3290800	171264
Kabupaten Mojokerto	2012	557.832	43397.4	1345440	129875

	2013	545.669	47756.3	1454225	130871
	2014	553.405	53203.6	1615005	139513
	2015	575.330	59184.9	1761486	145687
	2016	620.659	65115.8	3030000	149840
	2017	616.733	70863.2	3279975	155410
Kabupaten Jombang	2012	611.133	21580.5	1249664	149513
	2013	593.902	23829.8	1407811	156246
	2014	604.172	26339.1	1506509	169648
	2015	647.442	29148.0	1737968	175984
	2016	664.389	31983.1	1924000	184023
	2017	687.153	34940.0	2082730	188614
Kabupaten Nganjuk	2012	530.573	14087.5	1471102	165123
	2013	549.393	15624.5	1526864	175123
	2014	534.007	17243.8	1873558	184234
	2015	516.973	19122.2	1223948	198162
	2016	504.159	21113.9	1411000	199512
	2017	555.941	22892.1	1527407	201463
Kabupaten Madiun	2012	364.358	10182.0	1387746	115745
	2013	366.133	11293.6	154112	125716
	2014	362.786	12532.1	1620418	128956
	2015	351.752	13901.5	1550334	134510
	2016	349.665	15227.0	1340000	139848
	2017	376.948	16177.7	1450550	146562
Kabupaten Magetan	2012	355.505	10190.3	1591085	168181

	2013	353.328	11312.9	1778370	147525
	2014	343.550	12564.0	1731968	148192
	2015	352.826	13880.1	31979090	149586
	2016	390.608	15196.4	1283000	152901
	2017	393.126	16343.4	1388847	154800
Kabupaten Ngawi	2012	422.524	10695.6	1295746	155254
	2013	472.088	12026.2	1446375	158616
	2014	437.374	13311.8	1643734	161014
	2015	431.031	14994.5	1830873	168411
	2016	436.255	16529.9	1334000	175486
	2017	499.104	17810.6	1444055	185312
Kabupaten Bojonegoro	2012	656.394	43686.4	1375541	245869
	2013	695.281	48129.2	1444924	254886
	2014	628363	50533.9	1230647	264813
	2015	640.266	48606.5	1688996	274165
	2016	690.739	55581.4	1462000	279165
	2017	661.169	64886.2	1582605	281967
Kabupaten Tuban	2012	580.625	35180.2	1105475	180056
	2013	617.366	39008.4	1346604	189561
	2014	569.185	43801.5	1131404	191221
	2015	603.039	48117.7	1997506	210081
	2016	653.981	54207.2	1757000	211916
	2017	659.499	56501.1	1901952	223998
Kabupaten Lamongan	2012	621.617	20561.7	1202786	239464

	2013	644.188	23012.3	1218625	241685
	2014	611.621	25704.5	1173081	248716
	2015	633.048	28746.2	1507459	249846
	2016	638.330	31707.3	1573000	251864
	2017	634.845	34370.5	1702772	252734
Kabupaten Gresik	2012	570.038	74946.3	1609229	129461
	2013	619.688	83153.0	1950360	138946
	2014	592.569	94747.7	2100462	140265
	2015	611.721	100723.8	2507632	148051
	2016	662.618	107876.6	3042500	158113
	2017	664.532	118624.2	3293506	168393
Kabupaten Bangkalan	2012	468.379	28037.1	1555587	115611
	2013	474.876	19535.4	1554990	132418
	2014	473.411	21708.6	1577047	138945
	2015	481.352	19194.9	1379462	148513
	2016	482.634	20134.4	1414000	159518
	2017	494.269	21674.6	1530655	166768
Kabupaten Sampang	2012	491.217	12190.3	949576	151201
	2013	469.711	13977.7	961599	162421
	2014	507.605	14628.3	907918	175356
	2015	459.000	14697.3	1122769	185461
	2016	477.731	16245.0	1387000	190258
	2017	472.634	17707.3	1501427	195215
Kabupaten Sumenep	2012	617.160	20074.7	1308844	236458

	2013	629.431	25360.0	1502261	241561
	2014	622.460	28311.4	864861	249516
	2015	593.143	27156.1	851582	251684
	2016	629.844	28971.1	1398000	257486
	2017	619.659	30578.7	1513335	269005
Kota Kediri	2012	141.428	72303.0	161720	23548
	2013	136.564	79858.9	1622519	24862
	2014	145.426	87704.2	1498260	26162
	2015	142.628	95865.2	1605830	27654
	2016	144.688	106396.5	1494000	28681
	2017	145.556	116060.2	1617255	29306
Kota Blitar	2012	66.292	3545.8	1545382	14665
	2013	68.609	3929.5	1696530	17543
	2014	69.365	4354.3	2010864	18525
	2015	75.516	4819.1	2081554	19254
	2016	77.674	5331.3	1394000	20852
	2017	78.820	5802.4	1509005	21291
Kota Malang	2012	419.899	38747.0	1525956	56218
	2013	435.058	42819.9	1893817	60154
	2014	423.631	46563.2	1344869	64215
	2015	406.945	51824.4	1991809	68952
	2016	443.035	57170.6	2099000	70598
	2017	454.849	62359.3	2272160	77778
Kota Probolinggo	2012	112.074	5945.7	1734530	19313

	2013	106.309	6564.0	1804684	21896
	2014	113.550	8260.7	2374008	23595
	2015	109.336	8072.1	1940982	24621
	2016	118.848	8888.1	1603000	25195
	2017	115.740	9680.0	1735247	26125
Kota Pasuruhan	2012	95.643	4394.3	1481596	17254
	2013	98.160	4833.2	1921726	18641
	2014	97.127	5346.1	1888852	19235
	2015	97.493	5949.4	1751459	21895
	2016	99.493	6559.0	1757000	23584
	2017	99.294	1725.2	1901952	24257
Kota Mojokerto	2012	66.399	3663.9	1221446	12955
	2013	65.898	4036.1	1644872	13868
	2014	64.630	4427.1	2125413	14958
	2015	49.079	8441.6	2105254	15025
	2016	67.235	5370.4	1603000	15752
	2017	68.512	5848.2	1735247	17480
Kota Madiun	2012	84.693	7533.6	1366642	16898
	2013	90.103	8390.4	1802250	18658
	2014	86.618	9214.1	1094638	19523
	2015	90.721	10192.1	1634206	20183
	2016	94.435	11184.1	1394000	21048
	2017	90.358	12140.2	1509005	22662
Kota Surabaya	2012	1.437.448	293180.8	1418652	195264

	2013	1.483.343	327802.0	1716755	224581
	2014	1.465.502	365350.9	1867678	238916
	2015	1.468.094	406231.7	2197552	248610
	2016	1.495.837	451383.2	3045000	259462
	2017	1.520.041	495043.3	2396212	260762
Kota Batu	2012	104.012	8079.6	1304939	16205
	2013	105.445	9078.6	1419261	17248
	2014	406.777	10259.7	1089204	18654
	2015	405.496	11510.4	1536004	19115
	2016	3.115.591	12901.7	2026000	20510
	2017	112.502	14351.5	2193145	22544

Sumber BPS Jawa Timur

Lampiran B**Data Panel**

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 14:03

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.230833	0.025584	9.022429	0.0000
UMR	0.034659	0.054894	0.631375	0.5285
UKM	0.630533	0.027474	22.95013	0.0000
C	1.202798	0.361373	3.328416	0.0010
R-squared	0.845223	Mean dependent var		5.636892
Adjusted R-squared	0.843093	S.D. dependent var		0.348455
S.E. of regression	0.138028	Akaike info criterion		-1.104865
Sum squared resid	4.153284	Schwarz criterion		-1.043555
Log likelihood	126.6400	Hannan-Quinn criter.		-1.080112
F-statistic	396.8254	Durbin-Watson stat		1.079987
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran C

Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.734258	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0.015161	0.139940	0.001673	0.0023
UMR	0.007864	-0.022268	0.000358	0.1111
UKM	0.291065	0.655151	0.035101	0.0520

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 14:07

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.041824	0.870011	4.645718	0.0000
PDRB	0.015161	0.054391	0.278734	0.7808
UMR	0.007864	0.048193	0.163178	0.8706
UKM	0.291065	0.192900	1.508888	0.1331

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936732	Mean dependent var	5.636892
Adjusted R-squared	0.923175	S.D. dependent var	0.348455
S.E. of regression	0.096582	Akaike info criterion	-1.675151
Sum squared resid	1.697725	Schwarz criterion	-1.062056
Log likelihood	225.9418	Hannan-Quinn criter.	-1.427621
F-statistic	69.09390	Durbin-Watson stat	2.332381
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN D

Fixed effect Model

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 14:04

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.015161	0.054391	0.278734	0.7808
UMR	0.007864	0.048193	0.163178	0.8706
UKM	0.291065	0.192900	1.508888	0.1331
C	4.041824	0.870011	4.645718	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936732	Mean dependent var	5.636892
Adjusted R-squared	0.923175	S.D. dependent var	0.348455
S.E. of regression	0.096582	Akaike info criterion	-1.675151
Sum squared resid	1.697725	Schwarz criterion	-1.062056
Log likelihood	225.9418	Hannan-Quinn criter.	-1.427621
F-statistic	69.09390	Durbin-Watson stat	2.332381
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E

Uji Multikolinearitas

	PDRB	UMR	UKM
PDRB	0.190810	0.010662	0.093333
UMR	0.010662	0.030022	-0.005334
UKM	0.093333	-0.005334	0.163129

Lampiran F

Uji Heterokedatisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/30/19 Time: 17:49
 Sample: 2012 2017
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 37
 Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.532599	0.451841	-10.03141	0.0000
TK	0.878931	0.036399	24.14706	0.0000
PDRB	-0.048229	0.026714	-1.805352	0.0727
UMR	0.037060	0.023667	1.565896	0.1191
UKM	-0.071779	0.095314	-0.753076	0.4524

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.861753	Mean dependent var	0.073778
Adjusted R-squared	0.831202	S.D. dependent var	0.115436
S.E. of regression	0.047427	Akaike info criterion	-3.094068
Sum squared resid	0.407124	Schwarz criterion	-2.465646
Log likelihood	384.4416	Hannan-Quinn criter.	-2.840350
F-statistic	28.20635	Durbin-Watson stat	2.004029
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran G

Uji Normalitas

